

APAKAH ORGANIZATION CULTURE DAN WHISTLEBLOWING BERPENGARUH TERHADAP FRAUD?

Lutfi¹

Sarwenda Biduri²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)

lpsbs76@yahoo.com

sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out whether the organization culture and whistleblowing in partial effect on fraud as well as aims to find out whether the organization culture and whistleblowing in simultaneous effect on fraud. Approach this research using quantitative with the samples used in this study is the ASN in the Sidoarjo Inspectorate Office received a delegation of authority and responsibility to be involved in the management of the budget, the preparation of financial report, an examination of the management of budgets and financial reports. The data source in this research is the primary data by the method of survey through questionnaire deployment. Technique of data analysis used IE test validity and reliability tests, and for testing the hypothesis that used multiple linear regression analysis, namely using the SPSS program 18.0. Based on the results of the analysis it can be concluded that the organization culture and partially whistleblowing has no impact on fraud, the results of the next explain that together – the same organization culture and whistleblowing is not effect on fraud

Keywords: Organization Culture, Whistleblowing dan Fraud

1. Pendahuluan

Pertumbuhan bisnis maupun birokrasi pemerintahan saat ini yang mengalami kemajuan dalam berbagai bidang dan semakin kompleks, berkembang juga kegiatan pelanggaran dalam bentuk tindak kecurangan (*fraud*) ekonomi. Fraud bisa diartikan sebagai tindak kecurangan yang mempunyai arti suatu penyimpangan dan tindakan melanggar hukum, yang diperbuat secara sengaja demi tujuan tertentu seperti contoh menipu atau memberikan informasi yang salah kepada individu maupun kelompok lain, yang dilasanakan oleh individu maupun kelompok baik dari internal maupun dari eksternal organisasi. *Fraud* di bentuk demi menggunakan peluang – peluang secara tidak baik, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dapat membuat kerugian pihak lain (Karyono, 2013:17-25). Banyak kasus *fraud* yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun di sektor publik. *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) pada tahun 2014 dalam penelitiannya menyatakan bahwa setiap tahunnya perusahaan mengalami kerugian sebesar 5% akibat fraud, yang apabila dihitung dengan *Gross World Product* pada tahun 2013, mencapai USD 3.7 triliun. Dalam penelitian yang bersangkutan, didapat juga bahwa nilai median kerugian yang ditimbulkan karena *fraud* adalah sebanyak USD 145.000 yang dimana 22% dari keseluruhan permasalahan yang dilakukan penelitian mengalami kerugian sebanyak USD 1 juta (ACFE, 2014).

Salah satu permasalahan mengenai *fraud* yakni Enron dan juga KAP Arthur Andersen pada tahun 2001. Enron tidak mengungkapkan kerugian yang terjadi serta kewajibannya sehingga nilai keuntungan yang tercantum dalam laporan laba rugi menjadi menggelembung dan berdampak dalam menaikkan harga sahamnya. Kemudian *WorldCom* pada tahun 2014 yang melakukan tindakan *fraud* dengan memalsukan laporan keuangan. *WorldCom* melakukan pemalsuan milyaran transaksi bisnis rutinnya menjadi belanja modal, yang *Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper*

akhirnya hal tersebut membuat labanya overstead sejumlah \$11 milyar. Kasus tersebut adalah salah satu contoh kasus perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena skandal penyimpangan dengan bentuk melakukan kesalahan secara sengaja dalam menyajikan laporan keuangan, tindak korupsi serta kegiatan pencurian aset (Iltar, 2009:125-136). Kasus *fraud* ini tidak hanya terjadi di negara – negara maju, bahkan banyak pula masalah kecurangan yang muncul di Indonesia. Banyaknya kasus kecurangan akuntansi di Indonesia ini diperkuat dengan terjadinya likuidasi pada beberapa bank, kemudian diajukannya manajemen pada sektor BUMN dan swasta ke pengadilan, masalah kecurangan perbankan, dan manipulasi pajak (Soselisa dan Mukhlisin, 2008)

Tidak hanya pada sektor swasta kasus *fraud* terjadi, tetapi juga terdapat kasus *fraud* dalam lingkungan sektor publik. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara malah dipergunakan dengan tidak etis untuk kepentingan individu maupun golongan. Sesuai dengan prinsip – prinsip anggaran sektor publik yakni salah satunya adalah prinsip komprehensif dan akurat. Anggaran yang komprehensif yakni anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sedangkan prinsip anggaran yang akurat yakni alokasi anggaran seharusnya tidak mengandung unsur cadangan tersembunyi yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai alokasi pemborosan dan tidak efektifnya anggaran. (Mardiasmo, 2009). Dari penjelasan tersebut seharusnya pegawai pemerintah menyadari bahwa anggaran tersebut seharusnya sepenuhnya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bukan malah disalahgunakan untuk kepentingan individu maupun kelompok.

Salah satu bukti terjadinya kasus *fraud* yang terjadi di lingkungan sektor publik Indonesia adalah kasus *fraud* yang berhasil ditemukan dan dirangkum di dalam Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk semester I pada tahun 2013. Menurut hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 13.969 kasus ketidaktaatan terhadap perundang – undangan senilai Rp. 56,98 triliun, Hal ini diketahui publik dengan adanya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada tanggal 1 Oktober 2013. Di pertemuan tersebut salah satu jadwalnya adalah menyerahkan Hasil Pemeriksaan untuk semester I pada tahun 2013 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni Hadi Poernomo kepada DPR (BPK, 2013).

Kemudian pada tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 6.115 permasalahan ketidaktaatan kepada ketentuan perundang – undangan. Permasalahan tersebut meliputi masalah ketidaktaatan yang menyebabkan kerugian, peluang kerugian, dan kurangnya penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 3.784 permasalahan senilai Rp2,08 triliun. Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi masalah ketidaktaatan atas ketentuan perundang – undangan yang menyebabkan kerugian sebanyak 2.525 permasalahan senilai Rp1,13 triliun yang terjadi pada 512 OPD di Indonesia, peluang kerugian sejumlah 413 senilai Rp419,60 miliar, dan kurangnya penerimaan sejumlah 846 permasalahan senilai Rp537,72 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan pengembalian dana kepada kas daerah/negara atau menyerahkan kembali aset sebesar Rp388,19 miliar (BPK, 2017)

Beberapa permasalahan yang terjadi di atas salah satu faktor yang menjadi alasan yakni adanya *culture organization* yang tidak baik dalam sebuah organisasi. Selain diakibatkan oleh *culture organization*, terjadinya *fraud* juga dipengaruhi adanya penerapan *whistleblowing* dalam sebuah organisasi, Hal ini didukung dengan adanya kasus terkait *whistleblowing* yang terjadi pada PT. PLN (Persero) di Sumatera Utara, dimana dalam kasus ini masyarakat yang menjadi pihak eksternal perusahaan telah mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak PLN. Masyarakat mengungkapkan bahwa terjadinya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang diberikan pihak PLN. Masyarakat akhirnya mendesak BPK untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada PT. PLN di *Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper*

Sumatera Utara (Sore, 2014). Berdasarkan praktek yang dialami oleh peneliti, adanya *whistleblowing* merupakan salah satu alat yang dapat mengurangi adanya tindakan *fraud* pada sektor publik. Adanya pengungkapan atau pelaporan tindakan pelanggaran atau penyimpangan yang melawan hukum dan aturan perundang – undangan yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud* dalam sektor publik. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan (Kreshastuti dan Prastiwi, 2014:1-15) bahwa *whistleblowing* merupakan tindakan pengungkapan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam organisasi terkait adanya penyimpangan, perbuatan illegal atau tidak beretika kepada pihak di internal maupun di eksternal organisasi

Dari berbagai permasalahan terkait *fraud* yang dijelaskan di atas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti mengenai *fraud* yang terjadi di sektor pemerintahan. Maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah (1). Apakah *culture organization* secara parsial berpengaruh terhadap *fraud*?, (2). Apakah *whistleblowing* secara parsial berpengaruh terhadap *fraud*?, (3). Apakah *culture organization* dan *whistleblowing* secara simultan berpengaruh terhadap *fraud*?. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini yakni (1). Untuk mengetahui apakah *culture organization* secara parsial berpengaruh terhadap *fraud*?, (2). Untuk mengetahui apakah *whistleblowing* secara parsial berpengaruh terhadap *fraud*?, (3). Untuk mengetahui Apakah *culture organization* dan *whistleblowing* secara simultan berpengaruh terhadap *fraud*?

2. Tinjauan Teoritis

Fraud

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Karyono (2013:17-25) beberapa bentuk dari *fraud* dibagi menjadi:

1. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan ini bisa diperbuat dengan cara menyediakan laporan keuangan yang cenderung lebih bagus daripada laporan yang terjadi sebenarnya serta menyediakan laporan keuangan dengan kualitas lebih buruk dan tidak akurat daripada laporan sebenarnya. Adapun tindakan untuk melakukan kegiatan kecurangan ini terdiri dari:

- a. Pendapatan yang palsu
- b. Tidak tepatnya penilaian akhir atas aset
- c. Tidak melakukan pengungkapan adanya kewajiban
- d. Melakukan pencatatan saat masa akuntansi yang kurang tepat atas pendapatan, biaya, aktiva dan pasiva.
- e. Tidak mengungkapkan biaya diantaranya dengan melakukan pengkapitalisasian atas biaya
- f. Melakukan penyajian laporan keuangan dengan tidak sesuai misalnya dengan tidak mengungkapkan atas peristiwa atau transaksi penting dimana peristiwa tersebut memiliki pengaruh negatif atas komponen pada laporan keuangan

2. Penyalahgunaan Aset

a. Kecurangan Kas

1. Kecurangan Penerimaan Kas
2. Kecurangan Pengeluaran Kas

b. Melakukan Penyimpangan atas Persediaan serta Asset Lain

Kecurangan atas persediaan barang dan aset lainnya terbagi menjadi dua bentuk yakni pencurian dan penyalahgunaan (*misuse*). Pencurian diartikan sebagai kegiatan mengambil persediaan barang atau aset lainnya di gudang untuk tujuan tertentu dengan tidak mengimbangi kegiatan tersebut dengan melakukan pencatatan

atas kegiatan tersebut. Tindakan penyimpangan ini dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:

3. Korupsi

Korupsi diartikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum serta masyarakat luas demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Korupsi dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Pertentangan Kepentingan

Korupsi dalam bentuk ini terjadi pada saat pegawai atau pihak manajemen memiliki tujuan tersendiri atas kegiatan ataupun peristiwa keuangan pada sebuah organisasi atau perusahaan tempat dia bertugas atau bekerja, tujuan tersebut bertentangan terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan

b. Suap

Suap merupakan permohonan, penerimaan atau pemberian atas segala hal yang memiliki nilai guna memberikan pengaruh atas keputusan individu atas pekerjaannya

c. Pemberian yang tidak sah

Melakukan pemberian yang tidak sah merupakan memberikan sesuatu yang bernilai kepada individu atau golongan atas tindakan yang di ambil oleh seseorang. Tindakan itu memberikan keuntungan bagi yang melakukan pemberian tersebut

d. Pemerasan Ekonomi

Korupsi dalam bentuk ini, pegawai memungut imbalan dari pihak ketiga atas suatu keputusan dimana tindakan tersebut memberikan keuntungan pihak ketiga (*vendor*) tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan rasa takut, dengan memberikan bujukan, intimidasi serta ancaman

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator variabel untuk mengukur *fraud* yakni kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.

Pengaruh *Culture Organization* Terhadap *Fraud*

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zainuddin (2016), memperoleh hasil bahwa kecenderungan kecurangan (*fraud*) dipengaruhi secara parsial dan signifikan oleh budaya etis organisasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan budaya etis organisasi ditingkatkan maka terjadinya kecurangan (*fraud*) akuntansi akan semakin menurun.

Penjelasan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Artini,dkk. (2014) yang menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh budaya etis organisasi. Hal ini menyimpulkan bahwa dengan adanya penerapan budaya etis dalam sebuah organisasi akan menimbulkan dorongan serta dukungan kepada anggota dalam organisasi tersebut untuk melakukan perbuatan yang beretika yang pada akhirnya akan mengurangi terjadinya kecurangan.

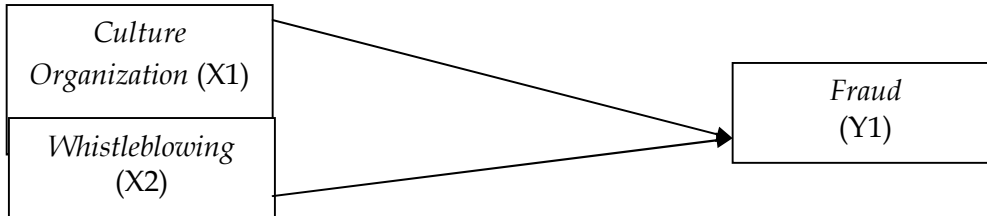
Pengaruh *Whistleblowing* Terhadap *Fraud*

Hubungan *whistleblowing* terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada pemerintah daerah ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wijaya, dkk. pada tahun 2017, yang dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwasannya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dipengaruhi negatif secara parsial dan signifikan oleh *whistleblowing*.

Hasil ini menggambarkan bahwa meningkatnya penerapan *whistleblowing* maka terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi akan mengalami penurunan. Hasil tersebut ditunjukkan oleh hasil dari jawaban responden yang menyatakan bahwa penerapan *whistleblowing* pada instansi dengan menitikberatkan dan memunculkan tanggapan akan pentingnya *whistleblowing* bagi pegawai ataupun untuk sebuah instansi dimana mereka *Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper*

bertugas yang hal ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung pegawai agar mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pelaporan atas setiap penyimpangan yang terjadi pada instansi untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah.

Rerangka Konseptual



Gambar 1. Rerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1 : *Culture Organization* berpengaruh terhadap *fraud*
- H2 : *Whistleblowing* berpengaruh terhadap *fraud*
- H3 : *Culture Organization* dan *Whistleblowing* berpengaruh terhadap *fraud*

3. Metode Penelitian

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Tabel 1
Variabel Penelitian

No	Variable	Definisi Operasional	Indikator Variabel
1	<i>Culture Organization</i>	<i>Culture Organization</i> merupakan suatu tanggapan anggota organisasi terkait pola perilaku dan keyakinan yang dijadikan sebagai suatu aturan tidak tertulis untuk semua anggota organisasi yang bisa diciptakan dengan cara menjadi model peran yang <i>visible</i> , mengkomunikasikan harapan – harapan etis, memberikan pelatihan etis, memberikan hukuman bagi tindakan tidak etis, dan memberikan mekanisme perlindungan etika	1. Model peran yang <i>visible</i> 2. Komunikasi harapan – harapan etis 3. Pelatihan etis 4. Hukuman bagi tindakan etis 5. Mekanisme perlindungan etika

2	<i>Whistleblowing</i>	<i>Whistleblowing</i> merupakan tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok untuk melakukan pengungkapan atau pelaporan atas kegiatan pelanggaran yang melawan hukum yang merugikan organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Aspek struktural2. Aspek operasional3. Aspek perawatan
3	<i>Fraud</i>	<i>Fraud</i> merupakan sebuah keinginan kejahatan atau pelanggaran yang dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi ataupun golongan yang diperbuat dalam bentuk berupa korupsi, penyalahgunaan asset serta kecurangan laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Kecurangan laporan keuangan2. Penyalahgunaan aset3. Korupsi

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Berdasarkan yang dikemukakan Sugiyono (2015:80) populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan yang terdiri dari subjek maupun objek yang memiliki kualitas serta spesifikasi tertentu yang bisa dijadikan subjek maupun objek penelitian. Populasi yang diambil untuk penelitian ini yaitu Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dimana orang pegawai tersebut menerima delegasi wewenang dan tanggungjawab untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan pengelolaan anggaran dan laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *sampling* jenuh. Pemilihan teknik *sampling* ini diambil dengan mempertimbangkan populasi yang dipilih memiliki jumlah yang sedikit. Alasan lain peneliti memilih untuk mengambil sampel tersebut karena Inspektorat merupakan auditor internal yang bertugas untuk menguji kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada suatu Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam pasal 1 ayat 46, dijelaskan bahwa inspektorat kabupaten/kota termasuk dalam Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Dijelaskan juga pada pasal 216 ayat 2 Undang – Undang yang sama bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah bisa menggambarkan dan memberikan informasi serta kondisi *fraud* pada Pemerintah Daerah sehingga peneliti tidak memilih untuk mengambil sampel pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data penelitian yang bisa dianalisis memakai statistik (Sugiyono, 2012:7). Sedangkan menurut Sujarweni (2015:89) data kuantitatif merupakan data yang dalam bentuk angka, contohnya yaitu harga saham, profitabilitas, aktiva, hutang. Dari kedua penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka yang dapat dianalisis menggunakan statistik. *Cross sectional* merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. *Cross sectional* berdasarkan yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010) adalah suatu penelitian non-eksperimental untuk menggali lebih dalam dinamika korelasi diantara penyebab resiko terhadap efek, melalui cara pendekatan pengamatan atau melakukan pengumpulan data secara sekaligus pada suatu waktu yang bersama.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan data primer. Dalam beberapa pengertian yang didefinisikan oleh para ahli, data primer adalah sumber data yang didapatkan dengan langsung berasal dari sumber data yang asli atau pihak pertama. Sugiyono (2012:137) menyebutkan bahwa data primer merupakan data yang bisa diperoleh secara langsung oleh peneliti.

Penelitian ini memakai kuisisioner sebagai teknik dalam pengambilan data yang diberikan kepada responden yang merupakan Pegawai Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Sidoarjo

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner kepada sampel yang ditentukan. Menurut Sugiyono (2014:142) kuisisioner adalah sebuah teknik untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan melalui cara memberikan serangkaian pertanyaan ataupun pernyataan secara tertulis kepada responden yang kemudian untuk dijawabnya. Kuisisioner yang dibagikan berisi pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Skala yang digunakan dalam kuisisioner ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2016:37-50) yaitu *Skala Likert*. Sugiyono (2012:93) menjelaskan bahwa *Skala Likert* merupakan alat yang dipakai untuk menghitung tanggapan orang lain mengenai keadaan sosial. Adapun rincian skor jawaban kuisisioner yang dibagikan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh yang dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2
Poin Kuisisioner (*Skala Likert*)

Pilihan	Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Najahningrum (2013)

Pengujian Hipotesis

Metode yang digunakan pada analisis ini adalah analisis regresi linier berganda, namun terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data sebelum melakukan pengujian hipotesis. Adapun uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

4. Analisis Data dan Hasil

1. Hasil Uji Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menguji instrumen yang dipakai dalam penelitian antara lain:

a. Hasil Uji Validitas

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:33) item pada suatu kuisioner yang memiliki hubungan validitas yang tinggi mempunyai syarat minimum yaitu apabila $r = 0,3$. sehingga apabila hubungan antara item pada suatu kuisioner dengan total skor $< 0,3$ dinyatakan item kuisioner tersebut *invalid*.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	17,0323	2,499	,402	,216	,678
X1.2	16,4194	2,585	,488	,401	,647
X1.3	16,5484	2,456	,533	,452	,627
X1.4	17,0645	2,596	,376	,207	,687
X1.5	17,3226	2,092	,526	,299	,626
X2.1	45,7419	22,798	,690	,791	,847
X2.2	45,5161	24,658	,612	,725	,853
X2.3	46,1290	26,116	,452	,914	,862
X2.4	45,8387	27,340	,412	,769	,865
X2.5	47,6129	22,712	,338	,393	,906
X2.6	45,9032	23,757	,708	,759	,846
X2.7	45,8065	23,961	,810	,940	,842
X2.8	45,6452	25,437	,711	,781	,851
X2.9	45,6129	24,778	,841	,912	,845
X2.1 0	45,5806	25,318	,719	,866	,850
X2.1 1	45,4516	25,389	,620	,795	,854
X2.1 2	45,5161	26,058	,490	,725	,860
Y1.1	10,4194	11,052	,777	.	,924
Y1.2	10,5161	12,325	,729	.	,918
Y1.3	10,6774	13,359	,763	.	,913
Y1.4	10,9032	13,957	,902	.	,910
Y1.5	10,9032	13,957	,902	.	,910
Y1.6	10,7097	13,213	.	.	,915
			,723		

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	17,0323	2,499	,402	,216	,678
X1.2	16,4194	2,585	,488	,401	,647
X1.3	16,5484	2,456	,533	,452	,627
X1.4	17,0645	2,596	,376	,207	,687
Y1.7	10,8065	14,628	,562	.	,924
Y1.8	10,9032	13,957	,902	.	,910
Y1.9	10,9355	14,329	,832	.	,914

Sumber : Data yang diolah (2018)

Melihat output pada tabel di atas, angka r hitung untuk item X1.1 sampai dengan item Y1.9 pada kolom *Corrected Item – Total Correlation* memiliki nilai $> 0,30$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung $> 0,30$. Dari hasil ini menunjukkan bahwa sertiap item pertanyaan pada kuisioner dapat dinyatakan layak digunakan sebagai alat ukur.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan yang dikemukakan Nunnally dalam (Dewinta, 2012) suatu variabel dibidang reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
<i>Culture Organization</i> (X1)	,703	,708	5
<i>Whistleblowing</i> (X2)	,867	,903	12
<i>Fraud</i> (Y)	,924	,949	9

Sumber : Data yang diolah (2018)

Berdasarkan data di atas, nilai dari *Cronbach's Alpha* pada ketiga variabel berturut-turut adalah 0,703, 0,867 dan 0,924. Nilai tersebut lebih besar dari nilai minimal suatu variabel dapat dinyatakan reliabel, yaitu 0,60. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel di atas dinyatakan reliabel atau handal.

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0 1	,171 ^a	,029	-,040	4,18285

a. Predictors: (Constant), *Total Whistleblowing*, *Total Culture Organization*

b. Dependent Variable: *Fraud*

Sumber : Data yang diolah (2018)

Hasil uji determinan penelitian ini adalah sebesar 0,029 atau 2,90%, sehingga bisa disimpulkan 97,10% dari variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lain selain *culture organization* dan *whistleblowing*.

b. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda dipakai untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2012:191)

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,563	8,638		,760	,454
Total <i>Culture Organization</i>	,648	,714	,296	,907	,372
Total <i>Whistleblowing</i>	-,163	,248	-,215	-,659	,516

a. Dependent Variable: Total Fraud

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 6,563 + 0,648X1 - 0,163X2$$

Keterangan:

Y : *Fraud*

X1 : *Culture Organization*

X2 : *Whistleblowing*

Rumusan masalah regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta 6,563 artinya jika tidak terdapat 2 variabel independen maka *fraud* sebesar 6,563
2. Nilai koefisien 0,648 diartikan jika ada penambahan *culture organization* sebesar 1, maka dapat meningkatkan *fraud* sebesar 0,648
3. Nilai koefisien -0,163 diartikan jika ada peningkatan *whistleblowing* sebesar 1, maka dapat menurunkan *fraud* sebesar 0,163

c. Hasil Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2013:98) menjelaskan bahwa Uji t digunakan untuk memberikan informasi seberapa besar pengaruh suatu variabel bebas secara sendiri terhadap variabel terikat.

Tabel 7
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,563	8,638		,760	,454
Total Culture Organization	,648	,714	,296	,907	,372
Total Whistleblowing	-,163	,248	-,215	-,659	,516

a. Dependent Variable: Total *Fraud*
Sumber: Data yang diolah (2018)

Dari tabel di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sig X1 0,372 > 0,05 dan nilai t hitung (0,907) < t tabel (1,701). Ini berarti, adanya *culture organization* (X1) tidak berpengaruh terhadap *fraud* (Y).
2. Sig X1 0,516 > 0,05 dan nilai t hitung (-0,659) < t tabel (1,701). Ini berarti, adanya *culture organization* (X1) tidak berpengaruh terhadap *fraud* (Y).

d. Hasil Uji F (Simultan)

Uji F digunakan dengan tujuan guna mencari tahu apakah secara bersama – sama koefisien variabel X memiliki pengaruh bermakna atau tidak terhadap variabel Y (Sugiyono (2012:192). Jika F hitung > F tabel dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka hasilnya secara bersama-sama kedua variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Tabel 8
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14,815	2	7,408	,423	,659 ^a
Residual	489,894	28	17,496		
Total	504,710	30			

a. Predictors: (Constant), Total Whistleblowing, Total Culture Organization

b. Dependent Variable: Total Fraud

Sumber : Data yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung < F tabel (0,659 < 3,34).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuji menggunakan program SPSS 18, maka pembahasannya sebagai berikut:

Pengujian H1 : *Culture Organization* berpengaruh terhadap *fraud*.

Uji t (parsial) menunjukkan bahwa *culture organization* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada Pemerintah Daerah. Hal ini dilihat dari hasil uji t (parsial) yang menunjukkan $\text{sig } 0,372 > 0,05$ dan nilai t hitung $(0,907) < t \text{ tabel } (1,701)$. Hal ini diartikan bahwa secara individu, variabel X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachrunisa (2015:1-15) di SKPD Kabupaten Kampar, dimana nilai dari t hitung $-2,034 > t \text{ tabel } 1,986$ dan nilai signifikansi $0,045 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwasannya jika sebuah organisasi memiliki kultur organisasi yang baik maka akan memperkecil kesempatan meskipun sedikit bagi pelaku penyimpangan.

Pengujian H2 : *Whistleblowing* berpengaruh terhadap *fraud*.

Menurut hasil uji t (parsial), menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil pada kolom sig sebesar 0,516 dan t hitung $t \text{ hitung } -0,659 < t \text{ tabel } 1,701$. Hal ini berarti bahwa secara parsial adanya *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Wijaya, dkk. (2017:1-12)) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *whistleblowing* terhadap *fraud*. Hasil ini digambarkan dengan didapatnya nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung 3,743 lebih besar dari t tabel yakni 2,0129. Hasil ini menggambarkan bahwa apabila *whistleblowing* mengalami peningkatan maka akan berdampak terhadap menurunnya tingkat terjadinya kecenderungan *fraud* akuntansi pada LPD di Kecamatan Gerokgak.

Hasil ini juga didukung dengan hasil dari kuisioner responden yang menjelaskan bahwa *whistleblowing* yang diterapkan instansi dengan memperhatikan dan mendorong tumbuhnya tanggapan akan perlunya *whistleblowing* bagi pegawai dimana mereka bertugas, yang diantara upayanya melalui pemberian pelatihan serta kegiatan sosialisasi kepada pegawai mengenai perlunya *whistleblowing* yang ditujukan dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindakan kecurangan.

Pengujian H3 : *Culture Organization* dan *whistleblowing* berpengaruh terhadap *fraud*

Berdasarkan hasil dari uji F pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa bahwa *culture organization* dan *whistleblowing* secara bersama – sama tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan tabel tersebut ditunjukkan bahwa pada kolom sig bernilai $0,659 > 0,05$ serta F hitung $0,659 < F \text{ tabel } 3,34$.

Hasil ini menjelaskan bahwasannya *fraud* pada Pemerintah Daerah tidak dipengaruhi secara simultan oleh *culture organization* dan *whistleblowing*. Meskipun adanya peningkatan *culture organization* dan penerapan *whistleblowing* secara bersama – sama dihadirkan di dalam sebuah organisasi perangkat daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya *fraud* pada Pemerintah Daerah

5. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasannya, maka penelitian ini dapat disimpulkan :

1. *Culture Organization* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini berarti bahwa, apabila terdapat *culture organization* yang meningkat dalam suatu organisasi perangkat daerah yang baik, maka tidak akan berdampak terhadap *fraud*.
2. *Whistleblowing* secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap *fraud* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat diartikan bahwa, meskipun terdapat penerapan *whistleblowing*, tetapi apabila tidak adanya sosialisasi, pegawai perangkat daerah tidak mengetahui serta menjalankan kebijakan tersebut dalam proses pekerjaan yang dilakukannya.
3. *Culture Organization* dan *whistleblowing* secara bersama – sama (simultan) tidak mempunyai pengaruh terhadap *fraud* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini bisa diartikan bahwasannya, meskipun adanya *culture organization* yang disertai diterapkannya *whistleblowing* tidak akan berpengaruh terhadap *fraud*.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan 2,90% atas variabel dependen yang ditentukan, sedangkan 97,10% dijelaskan oleh variabel independen lain. Sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian terbatas

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, penelitian diharapkan dapat turut serta membantu mengingatkan akan perlunya *culture organization* serta penerapan *whistleblowing* dalam kegiatan kerja yang dilakukan pegawai pemerintah di setiap organisasi perangkat daerah. Sehingga akan mencegah sekaligus mengurangi terjadinya tindakan penyimpangan, tindakan pelanggaran yang dilaksanakan baik oleh pihak internal maupun eksternal organisasi perangkat daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan variabel *moderating* untuk mendukung atas pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, serta menambahkan variabel independen agar bisa mengetahui penyebab – penyebab lain yang bisa mempengaruhi variabel terikat, misalnya seperti pengendalian internal, kesesuaian kompensasi serta moralitas individu, mengingat bahwa dari hasil penelitian ini bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan 2,90% variabel dependen.

6. DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. 2014. *Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2014 Global Fraud Study*. Association of Certified Fraud Examiner: Texas.
- BPK. 2013. *Warta BPK*. Badan Pemeriksa Keuangan: Jakarta.
- Fachrunisa, Aisah. 2015. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar. *Fakultas Ekonomi Vol. 2 (No. 2):1-15*.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ilter, C. 2009. Fraudulent Money Transfers: A Case from Turkey, *Journal of Financial Crime*. Turkey Vol. 16 (No. 2):125-136.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Andi: Yogyakarta.
- Kreshastuti, Destriana Kurnia dan Andri Prastiwi. 2014. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing. *Journal Diponegoro of Accounting* Vol 3 (No 2):1-15.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan (Fraud) : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sore, Berita. 2018. *Desak BPK Audit PLN*. 2014 [10 Januari 2018]. Available from www.beritasore.com/2014/08/11/desak-bpk-audit-pln/.
- Soselisa dan Mukhlisin. 2008. Pengaruh Faktor Kultur Organisasi Manajemen Strategik Keuangan dan Auditor Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. . Simposium Nasional Akuntansi XI Unika Pontianak.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- . 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- . 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- . 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- . 2014. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- . 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitas dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Wijaya, Kadek Dedy Santara, dkk. 2017. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, dan *Whistleblowing* Terhadap *Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper*

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD Di Kecamatan Gerokgak. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 7 (No. 1):1-12.

Zainuddin. 2016. Efektifitas Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. El-Muhasaba : Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate Vol. 7 (No, 1):37-50.